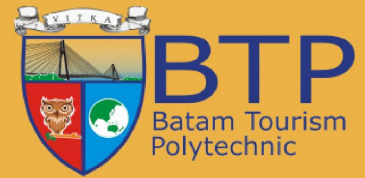


POLITEKNIK PARIWISATA BATAM

"Centre of Excellence in Tourism"



GOOD GOVERNANCE UNIVERSITY

📍 The Vitka City Complex
Jl. Gajah Mada, Tiban Ayu, Batam
Kepulauan Riau, INDONESIA 29425

☎ Phone : +62 778 3540889
🌐 <https://btp.ac.id>
✉ info@btp.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
TENTANG PENGESAHAN
GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
NOMOR: 003/SK/D-BTP/I/2015**

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya mewujudkan perguruan tinggi akuntabel yang dapat tumbuh secara berkelanjutan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Surat keputusan tentang Pengesahan *Good University Governance* di Lingkungan Politeknik Pariwisata Batam.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
3. STATUTA Politeknik Pariwisata Batam
4. Peraturan-peraturan yang berlaku di Politeknik Pariwisata Batam

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
TENTANG PENGESAHAN GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE**
- Pertama** : Penerapan *Good University Governance* seperti tertera dalam lampiran surat keputusan ini;
- Kedua** : Segala biaya yang di timbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini di bebaskan pada anggaran yang tersedia untuk itu;
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batam

Pada tanggal : 05 Januari 2015

Direktur Politeknik Pariwisata Batam



M. Nur A Nasution, S.Sos., M.Pd., CHA
NIDN. 3830046701

Tembusan:

1. Badan Pengurus Yayasan Vitka;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip

KATA PENGANTAR

Tata pamong merupakan sistem untuk memelihara efektivitas peran para konstituen dalam pengembangan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penyelenggaraan berbagai kegiatan suatu lembaga. Struktur tata pamong mencakup badan pengatur yang aktif dengan otonomi yang cukup untuk menjamin integritas lembaga dan memenuhi pertanggungjawaban dalam pengembangan kebijakan dan sumber daya yang konsisten dengan visi dan misi lembaga. Tata pamong mampu memberdayakan sistem pengelolaan yang berorientasi pada prinsip pengelolaan perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan tata pamong memungkinkan terbentuknya sistem administrasi yang berfungsi untuk memelihara efektifitas, efisiensi, dan produktivitas pewujudan visi, pelaksanaan misi, dan pencapaian tujuan serta memelihara integritas perguruan tinggi.

Implementasi tata pamong yang baik dicerminkan dari baiknya sistem pengelolaan fungsional perguruan tinggi, yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengarahan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, terutama dalam penggunaan sumber daya pendidikan, agar tercapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi. Sistem pengelolaan yang dikembangkan dapat menjamin berkembangnya kebebasan akademik dan otonomi keilmuan pada perguruan tinggi, serta mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan, dan seluruh sumber daya yang diperlukan untuk meraih keunggulan mutu yang diharapkan.

Untuk membangun tata pamong yang baik, perguruan tinggi harus memiliki kepemimpinan yang kuat yang dapat mempengaruhi seluruh perilaku individu dan kelompok dalam pencapaian tujuan. Kepemimpinan yang kuat adalah kepemimpinan yang visioner serta mampu merumuskan dan mengartikulasikan visi secara realistis dan kredibel.

Batam, 05 Januari 2015

Tim penyusun

DAFTAR ISI

COVER.....	i
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	2
BAB II TATA PAMONG.....	3
2.1 Kredibilitas.....	3
2.2 Akuntabilitas.....	5
2.3 Transparansi.....	7
2.4 Keadilan.....	9
2.5 Tanggungjawab.....	10
DAFTAR RUJUKAN	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tata pamong mengandung makna “bagaimana cara suatu bangsa mendistribusikan kekuasaan dan mengelola sumberdaya dan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat”. Konsep tata pamong harus dipahami sebagai suatu proses, bukan struktur atau institusi. Tata pamong Perguruan Tinggi berkenaan dengan sistem nilai, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam Perguruan Tinggi, termasuk juga tata pamong dalam komunitas di luar lingkungan akademik.

Badan Akreditasi Nasional - Perguruan Tinggi (BAN-PT) mendeskripsikan Tata Pamong sebagai sistem yang menjamin penyelenggaraan Perguruan Tinggi dalam memenuhi prinsip-prinsip kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan keadilan. Tata pamong dikembangkan berdasarkan nilai-nilai moral dan etika, serta norma-norma dan nilai akademik. Dalam hubungan dengan lingkungan eksternal, tata pamong yang baik mampu menciptakan hubungan saling membutuhkan dan saling menguntungkan antara Perguruan Tinggi dengan pemangku kepentingan. Tata pamong dan kepemimpinan yang baik memerlukan dukungan sistem pengelolaan yang baik.

Tata pamong dalam Perguruan Tinggi tidak terlepas dari sistem pengelolaan sumber daya, infrastruktur, proses dan kegiatan serta orang. Kepemimpinan efektif mencerminkan sistem pengelolaan yang baik apabila mampu mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur dalam Perguruan Tinggi untuk dapat mengikut nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang disepakati bersama, serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat. Kepemimpinan mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistis, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan, yang menekankan pada keharmonisan hubungan manusia dan mampu menstimulasi secara intelektual dan bijaksana bagi anggota untuk mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan arahan, tujuan, peran, dan tugas kepada seluruh unsur dalam Perguruan Tinggi.

Dalam menjalankan fungsi kepemimpinan dikenal kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik. Kepemimpinan operasional berkaitan dengan kemampuan menjabarkan visi, misi kedalam kegiatan operasional Perguruan Tinggi. Kepemimpinan organisasi berkaitan dengan pemahaman tata kerja antar unit dalam organisasi Perguruan Tinggi. Kepemimpinan publik berkaitan dengan kemampuan menjalin kerjasama dan menjadi rujukan bagi publik.

Dengan terlaksananya kepemimpinan efektif di lingkungan manajemen Politeknik Pariwisata Batam maka lengkaplah landasan untuk menjadikan perilaku semua unsur dalam Perguruan Tinggi mampu mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi. Pelaksanaan kepemimpinan efektif dalam pengaturan kerja di lingkungan manajemen Politeknik Pariwisata Batam mampu membantu mencapai tujuan yang lebih besar sejalan dengan visi dan misi Politeknik Pariwisata Batam sendiri. Mempertimbangkan hal-hal tersebut maka Politeknik Pariwisata Batam menetapkan kebijakan dan standar tata pamong yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi pimpinan dalam menciptakan suasana kepemimpinan efektif di lingkungan manajemen Politeknik Pariwisata Batam.

1.2 Tujuan

Penyusunan Pedoman Tata Pamong diharapkan menjadi acuan penerapan dan peningkatan kepemimpinan efektif di lingkungan manajemen Politeknik Pariwisata Batam. Pedoman ini memberikan manfaat untuk:

- 1) Sebagai produk dari misi organisasi guna mendorong tercapainya Visi,
- 2) Sebagai dasar pengambilan keputusan atas kegiatan yang berkaitan dengan kepemimpinan di lingkungan Politeknik Pariwisata Batam,
- 3) Menjadi acuan pelaksanaan tugas masing-masing sivitas akademika Politeknik Pariwisata Batam,
- 4) Mendorong proses pengelolaan yang efektif di lingkungan kampus Politeknik Pariwisata Batam.

BAB II TATA PAMONG

Tata pamong adalah sistem yang menjamin penyelenggaraan institusi dalam memenuhi prinsip-prinsip kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan. Tata pamong Politeknik Pariwisata Batam dikembangkan dengan penetapan dan penegakan sistem nilai dan norma, serta motivasi internal untuk mencapai tujuan institusi.

Pengembangan sistem tata pamong ini diharapkan mampu memberdayakan sistem pengelolaan yang berorientasi pada prinsip pengelolaan perguruan tinggi yang sehat. Pengaturan tata laksana organisasi ini bertujuan agar terbentuk sistem administrasi yang berfungsi untuk memelihara efektifitas, efisiensi dan produktifitas dalam upaya pewujudan visi, pelaksanaan misi, dan pencapaian tujuan serta memelihara integritas institusi.

2.1 Kredibilitas

1) Kebijakan, Aturan, Etika, dan Prosedur Layanan

Untuk dapat menyelenggarakan aktivitas Perguruan Tinggi dalam rangka mewujudkan visi, Politeknik Pariwisata Batam menetapkan dokumen pengembangan jangka panjang, dokumen kebijakan, pedoman dan panduan, peraturan tentang etika civitas akademika, dan prosedur layanan. Dokumen-dokumen tersebut berfungsi sebagai pemandu arah pergerakan, standarisasi kegiatan dan layanan, serta memberikan kepastian hukum. Dokumen pengembangan jangka panjang dan dokumen kebijakan juga berfungsi menjadi pengarah saat terjadi pergantian personil yang menduduki suatu jabatan pada unit tertentu.

2) Pemberlakuan Baku Mutu Pemilihan Pejabat Struktural

Politeknik Pariwisata Batam memberlakukan baku mutu pemilihan pejabat struktural yang mengacu pada:

- a. Statuta Politeknik Pariwisata Batam
- b. Peraturan lain yang terkait dengan proses pemilihan pejabat, baik yang telah ada maupun yang ditetapkan/disepakati pada saat pemilihan.

Selanjutnya, setiap pejabat struktural diberikan pembekalan sebelum ditempatkan pada unit terkait. Materi yang diberikan saat pembekalan pejabat struktural, disesuaikan dengan ranah

pekerjaannya. Saat pembekalan, calon pejabat dijelaskan secara detail tentang pekerjaan yang akan diamanahkan.

3) Instrumen untuk Melaksanakan Pekerjaan

Instrumen dan perangkat pendukung dalam melaksanakan pekerjaan di Politeknik Pariwisata Batam mencakup :

- a. Dokumen uraian pekerjaan (tupoksi) untuk seluruh anggota organisasi;
- b. Dokumen kebijakan, sasaran mutu, peraturan, pedoman, prosedur layanan, dan sejenisnya;
- c. Kantor/ruang kerja untuk setiap unsur sistem tata pamong;
- d. Anggaran untuk operasional dan melaksanakan kegiatan;
- e. Supporting staff untuk setiap unit kerja;
- f. Sarana perkantoran (komputer, ATK, dan jaringan internet); dan
- g. Sistem informasi dan dokumentasi.

4) Program-Program Peningkatan Kompetensi Manajerial

Politeknik Pariwisata Batam secara terencana dan tersistem melaksanakan program-program untuk meningkatkan kompetensi manajerial bagi setiap pemegang jabatan. Program ini dimaksudkan untuk menjamin proses pengelolaan yang efektif dan efisien di lingkungan Politeknik Pariwisata Batam yang mengarah pada pencapaian sasaran mutu dan produktifitas kinerja unit.

Peningkatan kompetensi manajerial bagi pimpinan unit secara periodik yang meliputi :

- a. Pelatihan penyusunan borang akreditasi dan evaluasi diri program studi;
- b. Pelatihan penyusunan kurikulum dan monev perkuliahan;
- c. Pelatihan pembuatan program kerja unit, pengelolaan anggaran, dan pelaporannya;
- d. Program-program lainnya yang relevan dengan peningkatan kemampuan manajerial.

Sementara, peningkatan kompetensi manajerial bagi staf administrasi/tenaga kependidikan dilaksanakan dengan cara pelatihan kecakapan komputer, customer service, marketing, pelayanan prima, manajemen perkantoran, dan program-program lainnya yang relevan dengan peningkatan mutu layanan.

2.2 Akuntabilitas

Akuntabilitas di lingkungan Politeknik Pariwisata Batam pada dasarnya merupakan pertanggungjawaban pengelolaan akademik dan sumberdaya serta pelaksanaan kebijakan dalam mencapai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas yang dimaksud meliputi akuntabilitas program, akuntabilitas kegiatan dan akuntabilitas keuangan.

1) Akuntabilitas Program

Sebagai perwujudan akuntabilitas program, Direktur bersama Wakil Direktur menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Institusi paling lambat 2 bulan setelah pengukuhan Direktur. Penyusunan renstra harus mengacu pada Rencana Jangka Panjang (RJP) Institusi dengan memperhatikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, kebijakan pemerintah, dan kondisi lingkungan. Jika diperlukan, Rencana Jangka Panjang dapat dievaluasi sebelum penyusunan Renstra.

Dalam proses penyusunan renstra, Direktur wajib melibatkan pejabat struktural minimal pada level strategic planning dan manajerial controll, serta stakeholders. Jika diperlukan juga dapat melibatkan pimpinan pada level operation controll. Penyusunan renstra juga harus mengacu pada data evaluasi diri, yang dirumuskan dalam sebuah analisis situasi. Renstra Institusi harus dibuat dalam rangka pencapaian sasaran mutu. Sasaran mutu harus merupakan indikator fundamental sebuah perguruan tinggi yang sehat dan pencirian core value sebagai sebuah Politeknik pariwisata yang unggul dan berkeadaban. Setelah renstra disusun, ditetapkan sebuah indikator kinerja setiap tahun selama periode renstra (5 tahun).

Selanjutnya, Renstra Institusi diturunkan ke dalam rencana operasional (renop) setiap unit yang disusun secara detail menjadi program-program kegiatan. Program Studi membuat renstra turunan yang substansinya tidak boleh lepas dari renstra Institusi dengan batas waktu renstra yang sama dengan renstra Institusi.

Program yang telah disusun kemudian ditetapkan batas waktu pencapaiannya dan harus diacu serta dijabarkan lebih lanjut menjadi kegiatan yang akan dilaksanakan oleh setiap unit kerja. Untuk mengukur tingkat keberhasilan program, setiap program harus memuat parameter/indikator kinerja dan memuat butir mutu yang akan ditingkatkan. Butir mutu ini dapat berupa sasaran mutu unit (yang merupakan turunan dari sasaran mutu Institusi) dan butir mutu borang akreditasi. Jika fakultas memiliki renstra turunan, sasaran mutu dan indikator kinerjanya minimal sama dengan indikator kinerja yang ditetapkan Institusi.

2) Akuntabilitas Kegiatan

Akuntabilitas kegiatan mencakup mekanisme/prosedur pencapaian tujuan yang di dalamnya mengandung kebijakan- kebijakan mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggung-jawaban. Akuntabilitas kegiatan mencakup akuntabilitas terhadap program yang direncanakan, akuntabilitas terhadap Standard Operating Procedure(SOP), dan akuntabilitas terhadap waktu yang direncanakan.

Akuntabilitas terhadap program kerja dimaksudkan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan unit benar-benar merupakan kegiatan yang telah diprogramkan. Akuntabilitas terhadap SOP dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Akuntabilitas terhadap waktu yang direncanakan dimaksudkan untuk menjamin kegiatan terdistribusi merata sepanjang tahun. Akuntabilitas terhadap waktu juga akan memudahkan dalam kontrol penyerapan anggaran.

3) Akuntabilitas Keuangan

Keuangan di seluruh unit di lingkungan Politeknik Pariwisata Batam harus dapat diakses setidaknya dalam periode bulanan oleh setiap unit yang menjadi kewenangannya. Satuan Pengawas Internal (SPI) dan auditor eksternal yang ditunjuk memiliki wewenang untuk melaksanakan tracking transaksi keuangan.

Peran teknologi informasi akan dimanfaatkan secara optimal dalam sistem akuntansi. Utilisasi teknologi informasi yang tepat dapat mendukung upaya untuk membangun manajemen keuangan dan sistem akuntansi yang terintegrasi dan dapat menghasilkan informasi yang cepat dan andal. Aspek mendasar lain dalam kaitan dengan pembaruan manajemen keuangan dan sistem akuntansi adalah pada upaya peningkatan kemampuan SDM yang inheren dalam proses dan dilaksanakan secara berkelanjutan.

Terwujudnya pengembangan dan atau pembangunan aspek- aspek di atas diharapkan akan dapat mendukung pengelolaan keuangan Institusi yang transparan dan akuntabel, mulai dari proses perumusan program yang di “link” dengan alokasi anggaran yang berkeadilan, tracking transaksi keuangan yang dilaksanakan secara sistemik, sampai dengan berfungsinya mekanisme pengendalian (control) atas keuangan Institusi.

Politeknik Pariwisata Batam menyajikan laporan keuangan konsolidasi secara periodik, yang setidaknya terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Laporan Arus Kas (Statement of Cash Flows)
- c. Catatan (pengungkapan/penjelasan) atas Laporan Keuangan
- d. Laporan Aktivitas.

Berjalannya manajemen keuangan dan sistem akuntansi tersebut didukung pula oleh SDM yang memadai dari segi kualitas dan kuantitas, yang dalam implementasinya berpijak pada *the right person in the right place*. Selain akuntabilitas dan transparansi akan dapat terwujud, pada gilirannya trust atau kepercayaan dari *stakeholders* juga akan dapat dicapai.

Bentuk pertanggungjawaban keuangan yang dilaporkan dalam laporan keuangan Politeknik Pariwisata Batam terdiri dari Laporan realisasi Anggaran, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun oleh masing-masing unit kerja memuat:

- a. Jenis dan periode pelaporan
- b. Tata cara penyusunan laporan keuangan
- c. Verifikasi dan rekonsiliasi
- d. Waktu penyampaian laporan keuangan
- e. Lain - lain pendukung laporan keuangan
- f. Isi catatan atas laporan keuangan
- g. Pos - pos laporan keuangan
- h. Sistematika isi laporan keuangan
- i. Rincian laporan keuangan dan penyusunan laporan barang

2.3 Transparansi

1) Transparansi Data dan Informasi

Politeknik Pariwisata Batam menerapkan prinsip - prinsip transparansi dalam penyelenggaraan Institusi dengan menerapkan Azaz keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan Institusi dapat diakses secara cepat dan jelas bagi pihak - pihak yang membutuhkan. Untuk ini, Politeknik Pariwisata Batam menerapkan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mendukung penerapan aspek - aspek transparansi penyelenggaraan organisasi.

Sistem Informasi Manajemen (SIM) dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan operasional sampai dengan pengambilan keputusan. Data - data transaksional yang selalu dinamis dan data - data untuk dukungan sistem pengambilan keputusan yang bersifat historis dikembangkan bersamaan dalam berbagai aspek manajemen Institusi. Pengembangan SIM sumberdaya manusia, keuangan, akademik, asset dan aspek-aspek lain sebagai bagian informasi manajemen dikembangkan atas dasar kebutuhan Institusi dan kebutuhan stakeholder.

Dalam kaitan ini maka pengembangan sumber daya manusia untuk mendukung pengembangan dan implelementasi sistem yang direncanakan dimasing - masing bagian manajemen dilakukan secara khusus. Sehubungan dengan ini, kemampuan dan kecakapan tenaga teknis dan administratif ditingkatkan sebagaimana mestinya untuk mempertahankan kelanjutan pengembangan TIK sejalan dengan kebutuhan Institusi.

Untuk menjamin transparansi, Institusi dan unit-unit di dalamnya menyajikan informasi yang lengkap bagi civitas akademika dan stakeholder melalui website institusi. Unit-unit dibawah Politeknik Pariwisata Batam dapat mengembangkan website dengan sub domain website Institusi. Kinerja institusi juga disosialisasikan melalui rapat dan dipublikasikan melalui media cetak maupun media elektronik.

2) Transparansi Kegiatan dan Layanan

Transparansi penyelenggaraan kegiatan Institusi merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi semua pihak baik anggota organisasi maupun masyarakat luas pengguna jasa layanan Politeknik Pariwisata Batam. Hal ini meliputi proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan dan pengendaliannya. Hal - hal yang dimaksud meliputi seluruh kegiatan layanan seperti:

- a. Prosedur pelayanan
- b. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan
- c. Rincian biaya pelayanan
- d. Waktu penyelesaian pelayanan
- e. Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab
- f. Lokasi pelayanan
- g. Janji pelayanan

- h. Standar pelayanan
- i. Informasi pelayanan

3) Transparansi Keuangan

Kondisi keuangan Politeknik Pariwisata Batam harus dapat dikontrol setiap saat oleh pihak-pihak yang diberi kewenangan. Institusi wajib menyampaikan laporan keuangan minimal satu kali dalam setahun kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan kepada stakeholder.

4) Transparansi Rekrutment dan Seleksi Pegawai

Dalam hal rekrutment pegawai (Dosen dan tenaga Kependidikan), Politeknik Pariwisata Batam wajib menyebarluaskan informasi melalui media cetak maupun media elektronik agar mampu menjangkau masyarakat luas. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh calon pegawai yang berkualitas melalui kompetisi yang terbuka.

Dalam hal seleksi penerimaan, panitia penerimaan pegawai (atau nama lain) harus menyajikan pemeringkatan nilai seleksi yang dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan.

2.4 Keadilan

1) Keadilan dalam hal Beban Kerja

Untuk menjamin pengelolaan kegiatan, Politeknik Pariwisata Batam memberikan beban kerja yang berkeadilan kepada seluruh pegawai. Keadilan beban kerja ini menyangkut kegiatan akademik (pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dan non akademik. Institusi juga memberikan akses yang sama kepada seluruh pegawai untuk dicalonkan sebagai pejabat struktural jika spesifikasi terpenuhi.

2) Sistem Reward and Punishment

Untuk meningkatkan kinerja Institusi, Politeknik Pariwisata Batam memberlakukan sistem reward and punishment. Penghargaan diberikan kepada pegawai, tidak hanya dalam konteks lamanya waktu pengabdian, tetapi terhadap prestasi akademik maupun non akademik yang diraih. Begitu juga, Politeknik Pariwisata Batam memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar kode etik atau kinerjanya dibawah standar yang ditentukan.

2.5 Tanggungjawab

1) Tanggungjawab Kepemimpinan

Setiap pejabat struktural di Lingkungan Politeknik Pariwisata Batam harus bertanggungjawab terhadap beban kerja yang diamanahkan dan bertanggungjawab terhadap keputusan yang diambil. Bentuk tanggung jawab dari setiap anggota sistem tata pamong diwujudkan dalam hal :

- a. Kepemimpinan langsung (directing) dan penggerakan (actuating) organisasi yang menjadi tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- b. Bentuk pertanggungjawaban kepemimpinan disampaikan dalam Laporan Kinerja Tahunan dan Laporan Akuntabilitas Tahunan.

2) Evaluasi Kinerja Tahunan

Dalam setiap akhir tahun akademik, dilakukan pengukuran terhadap kinerja kepemimpinan pejabat struktural. Pengukuran ini menggunakan instrument SKP, penilaian Indeks Tenaga Kependidikan (IKTD) atau indeks kinerja dosen (IKD). Jika hasil pengukurannya dibawah standar kinerja yang ditentukan, pejabat struktural dapat diganti tanpa harus menunggu habis masa jabatannya, walaupun yang bersangkutan tidak melanggar kode etik.

DAFTAR RUJUKAN

1. Pedoman Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*) Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan, 2003.
2. Kebijakan Mutu Internal Politeknik Pariwisata Batam, 2017.
3. Standar Mutu Internal Politeknik Pariwisata Batam, 2017.
4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi Permendikbud Tahun 2020 No. 3 Tahun 2020.
5. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SMPT), 2014.
6. Statuta Politeknik Pariwisata Batam.